



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 LATAR BELAKANG	1.1
1.2 LANDASAN HUKUM	I.5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I.9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I.10
BAB II RENCANA STRATEGIS	II.1
2.1 VISI DAN MISI RENSTRA	II.1
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	II.2
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	III.1
3.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	III.1
3.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	III.22
BAB IV PENUTUP	IV.1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, hanya kepada-NYA kita mengabdikan dan berserah diri karena telah diberikan kelapangan dan kesehatan sehingga dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2022.

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak, semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan yang merupakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Pekanbaru, 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU,**



MAMUN MUROM

Pembina Utama Madya

NIP. 19660610 199203 1 008

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan tersebut akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur seperti yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan perencanaannya, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis lima tahunan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good Governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Salah satu instrumen SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing Perangkat Daerah guna penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di

dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis Perangkat Daerah. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan variabel yang termuat dalam dokumen Renstra, sehingga RKT menjabarkan sasaran setiap tahunnya yang akan dilaksanakan sampai dengan lima tahun kedepan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut :

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu

kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut

1. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan sumberdaya alam
2. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih belum optimal
3. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan pemanfaatan dan perencanaan kehutanan
4. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
5. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan
6. Ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang kurang memadai
7. Perambahan kawasan hutan
8. Konflik tenurial
9. Illegal logging
10. Kebakaran hutan
11. Lahan kritis

Tabel 1.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Meningkatnya Kerusakan kawasan hutan dan lahan	Pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran dan kebakaran hutan di lahan gambut	Penurunan kualitas lingkungan

2.	Pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingginya kerusakan lingkungan akibat penambang emas Tanpa Izin ✓ Tingginya Tingkat kerusakan DAS ✓ Terjadinya kebakaran hutan dan lahan <p>Dari hal tersebut diatas mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan baik air, udara dan tanah</p>	Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik
3.	Masih rendahnya penanganan lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingginya kerusakan kawasan hutan dan lahan ✓ Terjadinya kebakaran hutan dan lahan ✓ Pelaksanan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan terjadinya kerusakan lingkungan yang terus menerus. 	Meningkatnya lahan kritis
4.	Penanganan pengelolaan sampah yang masih rendah	Meningkatnya pertumbuhan penduduk, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya sarana dan prasarana persampahan	Penyelesaian permasalahan sampah yang tidak konfrehensif dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak menjadi hambatan utama berjalannya pengelolaan sampah yang berkelanjutan

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 52);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 80);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42).
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);
30. Peraturan Gubernur Riau nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam

dokumen perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi dan Misi Renstra
- 2.2 Tujuan dan Sasaran

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021
- 3.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

BAB II. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta memuat strategi, arah kebijakan, program disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2019-2024. Rencana Strategis yang telah tersusun terstruktur mulai dari Visi sampai dengan Sasaran sebagai gambaran komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelembagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

2.1 VISI DAN MISI RENSTRA

A. VISI

Visi adalah rumusan umum tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Dalam rangka mencapai visi untuk kurun waktu jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau.

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2022, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan good government dan clean government	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan internal SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100
			Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100
			Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100
2	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	68,35
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	58,80
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	90,60
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	58,59
3	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Riau		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	1 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (%)	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	1 %
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (%)	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	1 %
			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700.000

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen-komponen, misalnya sasaran dan indikator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

3.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Pagu Murni DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 174.261.865.320,- Terdiri dari: Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 123.353.991.758.- dan Belanja Langsung (BL) : Rp. 50.907.873.562,-

Pada tahun 2020, APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengalami 4 kali pergeseran anggaran akibat pandemi covid 19 dan pagu DPPA berdasarkan Perda APBD Perubahan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 150.907.573.641,- Terdiri dari : Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 121.579.311.737.- dan Belanja Langsung (BL) : Rp. 29.328.261.904,-

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 132.013.986.148,- (87,48 %) dengan realisasi fisik sebesar 93,98% . Pagu total Terdiri dari: Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 113.406.754.701,- (93,28%) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Belanja Langsung : Rp.18.607.231.441,- (63,44%) dengan realisasi fisik sebesar 77,49%.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Riau**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
1	02									
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1	02	05								
			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP							
0.	0.	00.	01.							
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							

0.	0.	00.	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	15000 Surat	0	200	200	100,00	149	349	2,33
0.	0.	00.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	130 Rekening	0	26	26	100,00	26	52	40,00
0.	0.	00.	01.	003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	220 Unit	0	36	36	100,00	41	77	35,00
0.	0.	00.	01.	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
0.	0.	00.	01.	007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	225 Jenis	0	45	45	100,00	54	99	44,00
0.	0.	00.	01.	008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	90 Jenis	0	18	18	100,00	12	30	33,33
0.	0.	00.	01.	009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Jenis	0	6	6	100,00	12	18	30,00
0.	0.	00.	01.	010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	50000 Porsi	0	9.000	5.751	63,90	10.000	15.751	31,50
0.	0.	00.	01.	011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 Kali	0	120	120	100,00	75	195	39,00

0.	0.	00.	01.	012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	250 OB	0	36	36	100,00	50	86	34,40
0.	0.	00.	01.	013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	85 OB	0	17	17	100,00	17	34	40,00
0.	0.	00.	01.	037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	500 Persen	0	100	100	100,00	100	200	40,00
0.	0.	00.	02.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
0.	0.	00.	02.	013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	110 Unit	0	12	12	100,00	8	20	18,18
0.	0.	00.	02.	014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	60 Unit	0	12	12	100,00	10	22	36,67
0.	0.	00.	02.	016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2000 Unit	0	216	216	100,00	291	507	25,35
1	2	05			URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
1.	2.	05.	15.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN									

					PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
1.	2.	05.	15.	001.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	60 Kab/Kota	0	-	-	0,00	12	12	20,00
1.	2.	05.	15.	002.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	20 Dokumen Kualitas Lingkungan	0	4	4	100,00	4	8	40,00
1.	2.	05.	15.	003.	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah Segmen	5 Segmen	0	-	-	0,00	-	-	-
1.	2.	05.	15.	004.	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan dan penanganan sampah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	60 Kab/Kota	0	12	12	100,00	12	24	40,00
1.	2.	05.	15.	006.	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	340 Kasus	0	44	44	100,00	50	94	27,65
1.	2.	05.	15.	007.	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan	48 Lokasi	0	9	9	100,00	12	21	43,75

						usaha/kegiatan di kabupaten kota								
1.	2.	05.	15.	008.	Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	300 Usaha/Kegiatan	0	13	13	100,00	17	30	10,00
1.	2.	05.	15.	009.	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	60 Kab/Kota	0	12	12	100,00	12	24	40,00
1.	2.	05.	15.	010.	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	60 Kab/Kota	0	12	9	75,00	12	21	35,00
1.	2.	05.	15.	012.	Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah Dokumen DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	5 Dokumen	0	1	1	100,00	-	1	20,00

1.	2.	05.	15.	013.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	450 Unit	0	6	6	100,00	90	96	21,33
1.	2.	05.	15.	014.	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	60 Kab/Kota	0	12	7	58,33	12	19	31,67
1.	2.	05.	15.	015.	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	5 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2	40,00
1.	2.	05.	15.	016.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	5 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2	40,00
1.	2.	05.	15.	017.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	120 Unit	0	4	4	100,00	24	28	23,33
1.	2.	05.	15.	018.	Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal	40 Kab/Kota	0	5	5	100,00	5	10	25,00

1.	2.	05.	15.	023.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	Luasan yang dilakukan pemulihan Mangrove Hutan Bakau dalam upaya pengendalian kerusakan kawasan pesisir dan laut	150 Ha	0	-	-	0,00	-	-	-
1.	2.	05.	15.	027.	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungan	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
1.	2.	05.	15.	028.	Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Jenis Dokumen	40 Jenis Dokumen	0	8	8	100,00	8	16	40,00
1.	2.	05.	15.	029.	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2	200,00
1.	2.	05.	15.	030.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Unit	10 Unit	0	3	-	0,00	-	-	-
2	0	04			URUSAN KEHUTANAN									
2.	0.	04.	16.		PROGRAM PEMANFAATAN DAN									

					PENGUNAAN KAWASAN HUTAN									
2.	0.	04.	16.	001.	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Badan Usaha	205 Perusahaan	0	13	13	100,00	-	13	6,34
2.	0.	04.	16.	003.	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi masyarakat	145 Izin	0	7	7	100,00	20	27	18,62
2.	0.	04.	16.	004.	Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/H km/Desa	21 Lokasi	0	1	1	100,00	4	5	23,81
2.	0.	04.	16.	005.	Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	Jumlah dokumen penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	3 Dokumen	0	1	1	100,00	-	1	33,33

2.	0.	04.	16.	006.	Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap	Jumlah lokasi pemanfaatan ekowisata sungai di dalam dan sekitar areal KPH Tasik Besar Serkap bersama masyarakat Desa Sekitar Hutan	3 Lokasi	0	1	1	100,00	-	1	33,33
2.	0.	04.	16.	007.	Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahura SSH	Jumlah Lokasi	5 Lokasi	0	1	1	100,00	1	2	40,00
2.	0.	04.	16.	008.	Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Jumlah lokasi potensi ekowisata dan jasa lingkungan di KPH Suligi Batu Gajah	3 Lokasi	0	1	1	100,00	-	1	33,33
2.	0.	04.	16.	009.	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah dokumen	39 Dokumen	0	1	1	100,00	13	14	35,90
2.	0.	04.	16.	10	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Laporan	125 Laporan	0	23	13	56,52	23	36	28,80

2.	0.	04.	16.	012.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	013.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	014.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	015.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00

2.	0.	04.	16.	016.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	017.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	018.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	019.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	020.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00

2.	0.	04.	16.	021.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	022.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	023.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	024.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	025.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00

					teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api									
2.	0.	04.	16.	026.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	60 Bulan	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2.	0.	04.	16.	027.	Rekonsiliasi PNB (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2	40,00
2.	0.	04.	16.	028.	Pengembangan Perbenihan	Jumlah Bibit	100000 Batang	0	75.000	75.000	100,00	70.000	145.000	145,00
2.	0.	04.	16.	029.	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	0	2	2	100,00	2	4	40,00
2.	0.	04.	17.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN									

2.	0.	04.	17.	001.	Pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Jumlah lokasi pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	30 Lokasi	0	1	-	0,00	-	-	-
2.	0.	04.	17.	003.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	Jumlah unit sarana dan prasarana persemaian yang layak dan memadai	5 Unit	0	1	-	0,00	-	-	-
2.	0.	04.	17.	004.	Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	5 Dokumen	0	1	1	100,00	1	2	40,00
2.	0.	04.	17.	005.	Penanganan dan penyelesaian perkara /kasus tindak pidana kehutanan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	10 Kasus	0	2	2	100,00	2	4	40,00
2.	0.	04.	17.	006.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	Jumlah Laporan	60 Laporan	0	12	12	100,00	-	12	20,00

2.	0.	04.	17.	007.	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	60 Kab/Kota	0	11	8	72,73	12	20	33,33
2.	0.	04.	17.	008.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50 Ha	0	10	10	100,00	10	20	40,00
2.	0.	04.	17.	009.	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	25 Lokasi	0	2	3	150,00	-	3	12,00
2.	0.	04.	17.	010.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	65 Kali	0	13	13	100,00	13	26	40,00
2.	0.	04.	17.	011.	Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Frekuensi patroli	44 Kali	0	44	44	100,00	-	44	100,00
2.	0.	04.	17.	012.	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Unit	40 Unit	0	40	-	0,00	-	-	-
2.	0.	04.	17.	013.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00

					Karhutla UPT KPH Suligi - Batu Gajah									
2.	0.	04.	17.	014.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00
2.	0.	04.	17.	015.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00
2.	0.	04.	17.	016.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00
2.	0.	04.	17.	017.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00
2.	0.	04.	17.	018.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00
2.	0.	04.	17.	019.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00

					Karhutla UPT KPHP Minas Tahura										
2.	0.	04.	17.	020.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00	
2.	0.	04.	17.	021.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00	
2.	0.	04.	17.	022.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00	
2.	0.	04.	17.	023.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00	
2.	0.	04.	17.	024.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Indragiri	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00	

2.	0.	04.	17.	025.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Singingi	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	0	1	1	100,00	-	1	100,00
----	----	-----	-----	------	---	--------------------------	---------------------	---	---	---	--------	---	---	--------

3.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Pada dokumen Renja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk tercapainya tujuan dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Memperhatikan kebijakan pembangunan nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mencermati Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diperoleh hasil penyelarasan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2022 yang di usulkan berdasarkan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, maka terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan diantaranya adalah :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Ketiga (2022):
 - a. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Kehati) secara berkelanjutan
 - b. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan DAS
2. Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
3. Menghindari pelaksanaan pembangunan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi
4. Mengakomodir kegiatan baru yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi
5. Identifikasi program / kegiatan strategis daerah (pariwisata berbasis budaya, koordinasi supervisi KPK, penanganan karhutla dan sebagainya)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengusulkan 15 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2022 yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
12. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
13. Program Pengelolaan Hutan
14. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
15. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Adapun rincian rencana kegiatan per program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

TABEL T-C.33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI RIAU

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05.01.0.	NON URUSAN				8.546.138.938				10.470.000.000
1.2.05.01.0.0.	NON URUSAN				8.546.138.938				10.470.000.000
1.2.05.01.0.00.	NON URUSAN				8.546.138.938				10.470.000.000
1.2.05.01.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	7.402.673.539			100 Persen	9.170.000.000

1.2.05.01.0.0. 00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Kota Pekanbaru	3000 Surat	63.072.836	Pendapatan Asli Daerah		3000 Surat	70.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Provinsi Riau	26 Rekening	1.760.000.000	Pendapatan Asli Daerah		26 Rekening	1.800.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	44 Unit	736.682.806	Pendapatan Asli Daerah		44 Unit	800.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	12 Bulan	538.008.746	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	600.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	45 Jenis	191.497.744	Pendapatan Asli Daerah		45 Jenis	300.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	18 Jenis	133.519.207	Pendapatan Asli Daerah		18 Jenis	200.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	12 Bulan	259.560.006	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	300.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pekanbaru	10000 Porsi/Box	383.392.006	Pendapatan Asli Daerah		10000 Porsi/Box	400.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam dan Luar Daerah	100 Kali	1.071.953.643	Pendapatan Asli Daerah		100 Kali	1.500.000.000

1.2.05.01.0.0. 00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	50 OB	1.182.725.877	Pendapatan Asli Daerah		50 OB	2.000.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kota Pekanbaru	17 OB	535.230.006	Pendapatan Asli Daerah		17 OB	600.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau	100 Persen	547.030.662	Pendapatan Asli Daerah		100 Persen	600.000.000
1.2.05.01.0.0. 0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	513.465.399,00			100 Persen	600.000.000,00
1.2.05.01.0.0. 00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Provinsi Riau	22 Unit	190.205.133	Pendapatan Asli Daerah		22 Unit	200.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Provinsi Riau	12 Unit	136.405.133	Pendapatan Asli Daerah		12 Unit	200.000.000
1.2.05.01.0.0. 00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Riau	400 Unit	186.855.133	Pendapatan Asli Daerah		400 Unit	200.000.000
1.2.05.01.0.0. 0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	630.000.000,00			100 Persen	700.000.000,00

1.2.05.01.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Provinsi Riau	850 Stel	630.000.000	Pendapatan Asli Daerah		850 Stel	700.000.000
1.2.05.01.1.	URUSAN WAJIB				10.120.995.397				11.224.000.000
1.2.05.01.1.2.	WAJIB NON PELAYANAN DASAR				10.120.995.397				11.224.000.000
1.2.05.01.1.2.05.	LINGKUNGAN HIDUP				10.120.995.397				11.224.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Kualitas Udara; Persentase Peningkatan Kualitas Air;		0.66 Poin; 0.01 Poin;	10.120.995.397			0.66 Poin; 0.01 Poin;	11.224.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.001.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	138.975.285	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	200.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.002.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	Provinsi Riau	4 Dokumen	1.114.860.375	Pendapatan Asli Daerah		4 Dokumen	1.500.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.003.	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah Segmen	Provinsi Riau	1 Segmen	362.944.375	Pendapatan Asli Daerah		1 Segmen	400.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.004.	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan dan penanganan sampah terkait Kebijakan dan	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	316.819.975	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	400.000.000

		Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau							
1.2.05.01.1.2.05.15.005.	Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Dalam dan Luar Provinsi	2 Kali	327.255.875	Pendapatan Asli Daerah		2 Kali	350.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.006.	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	Provinsi Riau	70 Kasus	367.176.375	Pendapatan Asli Daerah		70 Kasus	400.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.007.	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten kota	Provinsi Riau	12 Lokasi	320.937.075	Pendapatan Asli Daerah		12 Lokasi	350.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.008.	Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	Provinsi Riau	60 Usaha/Kegiatan	166.148.575	Pendapatan Asli Daerah		60 Usaha/Kegiatan	200.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.009.	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	225.716.436	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	300.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.010.	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	217.641.375	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	300.000.000

		penerbitan izin pengelolaan Limbah B3							
1.2.05.01.1.2.05.15.011.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	4 Dokumen	195.579.675	Pendapatan Asli Daerah		4 Dokumen	200.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.012.	Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah Dokumen DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	361.620.375	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	400.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.013.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	Kota Pekanbaru	90 Unit	399.120.375	Pendapatan Asli Daerah		90 Unit	500.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.014.	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	272.370.375	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	300.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.015.	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	378.816.575	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	380.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.016.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD	Provinsi Riau	1 Dokumen	284.336.575	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	290.000.000

		Kabupaten/Kota di Provinsi Riau							
1.2.05.01.1.2.05.15.017.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Provinsi Riau	24 Unit	908.185.375	Pendapatan Asli Daerah		24 Unit	911.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.018.	Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	Provinsi Riau	8 Kab/Kota	263.187.375	Pendapatan Asli Daerah		8 Kab/Kota	265.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.019.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Lokasi Keanekaragaman Hayati di Areal Izin Usaha/Kegiatan	Provinsi Riau	12 Lokasi	281.926.375	Pendapatan Asli Daerah		12 Lokasi	285.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.020.	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Jumlah lokasi kampung iklim di Provinsi Riau yang dibina	Provinsi Riau	7 Lokasi	286.620.375	Pendapatan Asli Daerah		7 Lokasi	290.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.021.	Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	1 Dokumen	224.120.375	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	230.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.022.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat	Luas rehabilitasi dan pemulihan kawasan bekas tambang rakyat	Provinsi Riau	30 Ha	359.628.375	Pendapatan Asli Daerah		30 Ha	363.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.023.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian	Luasan yang dilakukan pemulihan Mangrove Hutan	Provinsi Riau	30 Ha	357.620.375	Pendapatan Asli Daerah		30 Ha	360.000.000

	Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	Bakau dalam upaya pengendalian kerusakan kawasan pesisir dan laut							
1.2.05.01.1.2.05.15.024.	Penyusunan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah dan Kehutanan	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	1 Dokumen	143.310.188	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	150.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.025.	Koordinasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi ekowisata berbasis pemanfaatan jasa lingkungan	Provinsi Riau	1 Lokasi	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Lokasi	210.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.026.	Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Hidup	Frekuensi Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Hidup	Kota Pekanbaru	22 Kali	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah		22 Kali	210.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.027.	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungan	Kota Pekanbaru	12 Bulan	324.120.375	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	330.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.028.	Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Jenis Dokumen	Provinsi Riau	8 Jenis Dokumen	354.525.975	Pendapatan Asli Daerah		8 Jenis Dokumen	360.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.030.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Unit	Provinsi Riau	2 Unit	424.120.375	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	430.000.000

1.2.05.01.1.2.05.15.032.	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	1 Dokumen	243.310.188	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	250.000.000
1.2.05.01.1.2.05.15.033.	Pembinaan Kota Bersih	Jumlah Kab/Kota Bersih	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	110.000.000
1.2.05.01.2.	URUSAN PILIHAN				17.755.245.547				18.356.899.999
1.2.05.01.2.0.	URUSAN PILIHAN				17.755.245.547				18.356.899.999
1.2.05.01.2.0.04.	KEHUTANAN				17.755.245.547				18.356.899.999
1.2.05.01.2.0.04.16.	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan		700000.00 Ha	12.717.280.243			700000.00 Ha	13.206.000.000
1.2.05.01.2.0.04.16.001.	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Badan Usaha	Provinsi Riau	40 Perusahaan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		40 Perusahaan	240.000.000
1.2.05.01.2.0.04.16.002.	Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Hak/Rakyat	Jumlah Unit Pemanfaatan Hutan Rakyat	Provinsi Riau	35 Unit	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		35 Unit	136.000.000
1.2.05.01.2.0.04.16.003.	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi masyarakat	Provinsi Riau	25 Izin	235.515.239	Pendapatan Asli Daerah		25 Izin	240.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.004.	Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/H km/Desa	Provinsi Riau	3 Lokasi	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		3 Lokasi	240.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.005.	Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	Jumlah dokumen penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	240.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.006.	Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap	Jumlah lokasi pemanfaatan ekowisata sungai di dalam dan sekitar areal KPH Tasik Besar Serkap bersama masyarakat Desa Sekitar Hutan	Provinsi Riau	1 Lokasi	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Lokasi	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.007.	Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahura SSH	Jumlah Lokasi	Provinsi Riau	1 Lokasi	335.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Lokasi	400.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.008.	Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Jumlah lokasi potensi ekowisata dan jasa lingkungan di KPH Suligi Batu Gajah	Kabupaten Kampar	1 Lokasi	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Lokasi	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.009.	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah Laporan	Provinsi Riau	13 Laporan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		13 Laporan	140.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.010	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Laporan	Provinsi Riau	25 Laporan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		25 Laporan	240.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.011.	Optimalisasi PNPB (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Jumlah dokumen Rekonsiliasi PNPB Sektor kehutanan	Provinsi Riau	1 Dokumen	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.012.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	Provinsi Riau	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.013.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	Provinsi Riau	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.014.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Kota Pekanbaru	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.015.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT	Kabupaten Bengkalis	12 Bulan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	300.000.000

		KPH Bengkalis Pulau							
1.2.05.01.2.0. 04.16.016.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Kabupaten Siak	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.017.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Kabupaten Rokan Hulu	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.018.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Kabupaten Kampar	12 Bulan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	300.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.019.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Kabupaten Pelalawan	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.020.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Kabupaten Kepulauan Meranti	12 Bulan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	240.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.021.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Kabupaten Indragiri Hilir	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.022.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Kabupaten Indragiri Hulu	12 Bulan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	240.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.023.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	Kabupaten Kuantan Singingi	12 Bulan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	240.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.024.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Provinsi Riau	12 Bulan	222.171.600	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	240.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.025.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Kabupaten Rokan Hilir	12 Bulan	235.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	240.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.026.	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kabupaten Kampar	12 Bulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Bulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.028.	Pengembangan Perbenihan	Jumlah Bibit	Provinsi Riau	20000 Batang	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		20000 Batang	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.029.	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani	Provinsi Riau	2 Kelompok Tani	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Kelompok Tani	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.030.	Kemitraan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	3 Dokumen	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		3 Dokumen	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.031.	Sistem Informasi Kehutanan	Jumlah Sistem	Provinsi Riau	1 Sistem	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Sistem	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.032.	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kajian	Provinsi Riau	1 Dokumen	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.033.	Identifikasi Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Luas Hutan Yang Teridentifikasi Dan terselesaikan Dari Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Provinsi Riau	4 Ha	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		4 Ha	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.034.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	Provinsi Riau	1 Dokumen	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	140.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.035.	Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan KPH	Provinsi Riau	1 Dokumen	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.036.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Minas Tahura	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.037.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.038.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Rokan Hilir	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.039.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Bengkalis	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.040.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Siak	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.041.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Rokan Hulu	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.042.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Kampar	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.043.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Kampar	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.044.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Pelalawan	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.045.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Kepulauan Meranti	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.046.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Indragiri Hilir	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.047.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Indragiri Hulu	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.048.	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Kabupaten Kuantan Singingi	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.049.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.050.	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.051.	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri, Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.052.	Pendampingan dan Penilaian lomba Wana lestari	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Lomba Wana Lestari	Provinsi Riau	12 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.053.	Pelaksanaan dan Penyuluhan Sekolah Lapang	Jumlah Penyuluhan Sekolah Lapang	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.054.	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Provinsi Riau	1 Unit Wilayah Kerja	135.505.004	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit Wilayah Kerja	150.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.055.	Pendataan Potensi Konflik Tenurial dan Hutan Adat UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura	Provinsi Riau	1 Wilayah Kerja	286.667.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.056.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPHP Tasik Besar Serkap	Provinsi Riau	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.057.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api	Kabupaten Rokan Hilir	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.058.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau	Kabupaten Bengkalis	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.059.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	Kabupaten Siak	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.060.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.061.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Kabupaten Kampar	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.062.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	Kabupaten Kampar	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.063.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	Kabupaten Pelalawan	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.064.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	Kabupaten Kepulauan Meranti	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.065.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	Kabupaten Indragiri Hilir	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.066.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Indragiri	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	Kabupaten Indragiri Hulu	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.16.067.	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Singingi	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	Kabupaten Kuantan Singingi	1 Wilayah Kerja	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja	290.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.068.	Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial	Jumlah Usulan	Provinsi Riau	13 Usulan	135.505.000	Pendapatan Asli Daerah		13 Usulan	140.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.16.069.	Sosialisasi Perhutanan Sosial	Jumlah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Percepatan Perhutanan Sosial	Provinsi Riau	11 Kab/Kota	286.666.600	Pendapatan Asli Daerah		11 Kab/Kota	290.000.000
1.2.05.01.2.0.04.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis		1.00 Persen	5.037.965.304			1.00 Persen	5.150.899.999
1.2.05.01.2.0. 04.17.001.	Pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Jumlah lokasi pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Provinsi Riau	6 Lokasi	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		6 Lokasi	101.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.002.	Aksi serentak menanam pohon dan penghijauan dan konservasi alam Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Lokasi	110.868.720	Pendapatan Asli Daerah		1 Lokasi	110.899.999
1.2.05.01.2.0. 04.17.003.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	Jumlah unit sarana dan prasarana persemaian yang	Provinsi Riau	1 Unit	145.399.824	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	146.000.000

		layak dan memadai							
1.2.05.01.2.0. 04.17.004.	Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Dokumen	185.472.720	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	186.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.005.	Penanganan dan penyelesaian perkara /kasus tindak pidana kehutanan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	Provinsi Riau	2 Kasus	173.160.120	Pendapatan Asli Daerah		2 Kasus	174.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.006.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	Jumlah Laporan	Provinsi Riau	12 Laporan	176.509.520	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	177.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.007.	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	166.560.720	Pendapatan Asli Daerah		12 Kab/Kota	167.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.008.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	10 Ha	166.560.720	Pendapatan Asli Daerah		10 Ha	167.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.009.	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	Provinsi Riau	5 Lokasi	166.560.720	Pendapatan Asli Daerah		5 Lokasi	167.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.010.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Provinsi Riau	13 Kali	166.560.720	Pendapatan Asli Daerah		13 Kali	167.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.17.030.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Provinsi Riau	1 Wilayah Kerja KPH	172.250.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	174.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.031.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Provinsi Riau	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.032.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Rokan Hilir	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.033.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Bengkalis	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.034.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Siak	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.035.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Rokan Hulu	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.036.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Kampar	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.037.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Kampar	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.038.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Pelalawan	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.039	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah wilayah Kerja KPH	Kabupaten Kepulauan Meranti	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.17.040.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Indragiri	JUmlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Indragiri Hulu	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.041.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Singingi	Jumlah wilayah Kerja KPH	Kabupaten Kuantan Singingi	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.042.	Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitashutan dan Lahan	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.043.	Penyediaan Sumber Daya Genetik	Jumlah Jenis Genetik	Provinsi Riau	5 Jenis	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Jenis	110.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.044.	Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	Provinsi Riau	4 Ha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		4 Ha	110.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.045.	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberikan Kampanye Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	78 Desa/Kelurahan	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		78 Desa/Kelurahan	90.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.046.	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Diselesaikan	Provinsi Riau	3 Kasus	163.000.000	Pendapatan Asli Daerah		3 Kasus	165.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.047.	Penanganan Penegakan Hukum Pidana Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kasus Yang Ditangani	Provinsi Riau	2 Kasus	163.905.760	Pendapatan Asli Daerah		2 Kasus	165.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.17.048.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pencegahan Hutan Dan Lahan	Jumlah Alat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	5 Set	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Set	100.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.049.	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	90.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.050	Penyelenggaraan Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Siaga Trampil Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Riau	25 Orang	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		25 Orang	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.051.	Rehabilitasi Lahan Melalui Penghijauan Lingkungan	Jumlah Areal Yang Direhabilitasi	Provinsi Riau	2 Ha	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Ha	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.052.	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) UPT. KPHP Minas Tahura	Jumlah Unit Areal Wilayah Kerja UPT. KPHP Minas Tahura	Provinsi Riau	2 Unit	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.053.	Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen	Provinsi Riau	1 Dokumen	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.054.	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Sumber Benih Yang Dibina	Provinsi Riau	13 Sumber Benih	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		13 Sumber Benih	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.055.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH UPT. KPHP Minas Tahura	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Riau	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.056.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Riau	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.17.057.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Rokan Hilir	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.058.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Bengkalis	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.059.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Siak	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.060.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Rokan Hulu	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.061.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Kampar	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.062.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Kampar	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.063.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Pelalawan	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.064.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Tebing Tinggi	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Kepulauan Meranti	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.065.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Indragiri Hilir	11 Kali	90.750.000	Pendapatan Asli Daerah		11 Kali	92.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.066.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Indragiri	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Indragiri Hulu	10 Kali	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		10 Kali	83.000.000

1.2.05.01.2.0. 04.17.067.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT. KPH Singingi	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kabupaten Kuantan Singingi	20 Kali	82.405.760	Pendapatan Asli Daerah		20 Kali	85.000.000
1.2.05.01.2.0. 04.17.068.	Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT. KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Kabupaten Indragiri Hilir	1 Wilayah Kerja KPH	81.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Wilayah Kerja KPH	83.000.000
J U M L A H					36.422.379.882				40.050.899.999

BAB IV. PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana Kinerja Tahunan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan dan memberikan gambaran yang jelas serta transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Tahun 2022.

**REKAPITULASI PENYESUAIAN HASIL PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN RANCANGAN RENJA PD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022**

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT	
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14			
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	OK	SEKRETARIAT	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Persentase peningkatan kualitas air			
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				100 %		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakvat					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah tingkat ketaatan pemegang izin usaha dan/atau kegiatan dalam melaporkan tinggi muka air tanah	14 izin usaha dan/atau kegiatan	OK	BID PENCEMARAN
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		persentase perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	100 %		
		Penanganan dan penyelesaian perkara/ kasus tindak pidana kehutanan					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah lokasi perlindungan hutan	12 Lokasi	OK (PRIORITAS)	BID PENAATAN
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan									
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						
						Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau					Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Lahan Mangrove Yang direhabilitasi	4 Ha	OK (PRIORITAS)	BID DAS
UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Perbenihan Tanaman Hutan		persentase pemenuhan kebutuhan bibit untuk penghijauan	100%		
		Pembinaan perbenihan tanaman hutan					Sertifikasi Sumber Benih	pembinaan sumber benih bersertifikat	13 sumber benih		UPT PERBENIHAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MODEL MINAS TAHURA											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH BAGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-api	100%		
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH BAGAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi-Api					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	OK (PRIORITAS)	UPT KPH BAGAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BENGKALIS PULAU											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkulu Pulau					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH BENGKALIS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkulu Pulau	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	3 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH BENGKALIS
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	3 Unit Wilayah Kerja	OK (PRIORITAS)	UPT KPH BENGKALIS
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MANDAU											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH MANDAU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan		
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	100%		
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH MANDAU
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	OK (PRIORITAS)	UPT KPH MANDAU
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) ROKAN											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	1 Wilayah Kerja KPH		UPT KPH ROKAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SULIGI BATU GAJAH											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH SBG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi Batu Gajah	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH SBG
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi - Batu Gajah					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH	OK (PRIORITAS)	UPT KPH SBG
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH KAMPAR KIRI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	100%		
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH KAMPAR KIRI
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Kampar Kiri					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja	1 Wilayah Kerja		UPT KPH KAMPAR KIRI

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14		
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SOREK											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
									Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
									Persentase Tingkat Kehadiran ASN		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar		1 Rekening	UPT KPH SOREK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan		
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	100%	

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH SOREK
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Sorek					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	1 Wilayah Kerja KPH		UPT KPH SOREK
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TASIK BESAR SERKAP											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT	
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14			16
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening			UPT KPH TEBING TINGGI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	100%		
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	3 Unit Wilayah Kerja			UPT KPH TEBING TINGGI

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Tebing Tinggi					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Unit Wilayah Kerja KPH	3 Unit Wilayah Kerja	OK (PRIORITAS)	UPT KPH TEBING TINGGI
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MANDAH											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH MANDAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14		
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	100%		
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH MANDAH
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandah					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pembinaan MPA dan Penganggungan Karhutla	5 MPA	OK (PRIORITAS)	UPT KPH MANDAH
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) INDRAGIRI											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
								Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
								Persentase Tingkat Kehadiran ASN			

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	1 Rekening		UPT KPH INDRAGIRI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	100%		
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja		UPT KPH INDRAGIRI
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Indragiri					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH		UPT KPH INDRAGIRI

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14		
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SINGINGI											
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
									Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
									Persentase Tingkat Kehadiran ASN		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar		1 Rekening	UPT KPH SINGINGI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan		
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	100%	
		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi					Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Unit Wilayah Kerja		1 Unit Wilayah Kerja	UPT KPH SINGINGI

RENJA PD TAHUN 2022			PEMETAAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)							KETERANGAN	BIDANG/ UPT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Peningkatan Perlindungan Hutan	100%		
		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Singingi					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	1 Wilayah Kerja KPH		UPT KPH SINGINGI